

KEMUNCULAN DAN RAGAM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI NUSANTARA PADA MASA PRA-KOLONIAL BELANDA DALAM PERSPEKTIF SOSIAL POLITIK

Kesty Amia Zora*¹, Jamrizal², dan Salahuddin³

^{1,2,3}UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

* Corresponding Author: kestyamiazora12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemunculan dan ragam lembaga pendidikan Islam di Nusantara pada masa pra-kolonial Belanda (abad ke-13–16) serta mengkaji pengaruh faktor sosial dan politik terhadap perkembangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) dan analisis deskriptif-analitis terhadap berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kemunculan lembaga pendidikan Islam merupakan bagian dari proses Islamisasi yang berlangsung secara bertahap melalui interaksi perdagangan, sosial, dan budaya. Lembaga pendidikan berkembang dalam berbagai bentuk seperti surau, pesantren, dayah, meunasah, dan langgar yang adaptif terhadap kondisi lokal. Faktor sosial seperti kebutuhan pendidikan agama, interaksi dengan pedagang Muslim, peran ulama, dan perkembangan komunitas menjadi pendorong utama, sedangkan faktor politik seperti dukungan kerajaan Islam, integrasi kekuasaan dan agama, serta jaringan ulama memperkuat legitimasi dan keberlanjutannya. Kesimpulannya, lembaga pendidikan Islam pada masa pra-kolonial tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial-politik yang berperan dalam pembentukan karakter masyarakat dan struktur kekuasaan.

Kata Kunci : Pendidikan Islam, Islamisasi Nusantara, Lembaga Pendidikan Islam, Pra-Kolonial Belanda, Sosial Politik

Abstract

This study aims to analyze the emergence and variety of Islamic educational institutions in the Nusantara during the pre-Dutch colonial period (13th–16th centuries) and to examine the influence of social and political factors on their development. This research uses a qualitative method with a library research approach and descriptive-analytical analysis of various relevant scientific literature sources. The study results indicate that the emergence of Islamic educational institutions was part of the Islamization process, which occurred gradually through trade, social, and cultural interactions. Educational institutions developed in various forms such as surau, pesantren, dayah, meunasah, and langgar, which adapted to local conditions. Social factors such as the need for religious education, interaction with Muslim traders, the role of scholars, and community development became the main drivers, while political factors such as support from Islamic kingdoms, the integration of power and religion, and scholar networks strengthened legitimacy and continuity. In conclusion, Islamic educational institutions in the pre-colonial period not only functioned as centers of religious education, but also as part of the socio-political system that played a role in shaping the character of society and the structure of power.

Keywords : Islamic Education, Islamization of the Nusantara, Islamic Educational Institutions, Pre-Dutch Colonial, Socio-Political

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan karena keduanya merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia (Asiyah, 2019).

Dalam sejarah Islam, pendidikan memiliki peranan penting sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai sekaligus membentuk masyarakat Muslim yang berilmu dan berakhlak mulia (Syafei, 2025). Penyebaran Islam di Nusantara tidak hanya terjadi melalui perdagangan, perkawinan, dan jalur politik, tetapi juga melalui jalur sosial serta pendidikan yang berperan penting dalam keberlanjutan proses Islamisasi (Sumardi & Harbi, 2025).

Sebelum datangnya kolonial Belanda, sistem pendidikan Islam di Nusantara telah berkembang secara alami dan pesat seiring perkembangan Islam yang berlangsung dengan damai serta menyesuaikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat (Rohani et al., 2022). Sistem pendidikan Islam di Nusantara pada awalnya tidak berbentuk formal seperti institusi pendidikan modern, melainkan berkembang melalui berbagai lembaga tradisional yang memiliki fungsi utama sebagai pusat pendidikan keagamaan. Lembaga-lembaga tersebut meliputi masjid yang menjadi pusat kegiatan ibadah sekaligus pembelajaran, surau atau langgar yang berkembang di wilayah Sumatra dan sebagian Jawa sebagai ruang pendidikan informal berbasis komunitas, serta pesantren di Jawa yang telah memiliki sistem pendidikan lebih terorganisir dalam pengajaran ilmu keislaman. Keberadaan lembaga-lembaga ini menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara telah memiliki tradisi intelektual Islam yang kuat jauh sebelum hadirnya sistem pendidikan modern pada masa kolonial (Setyawan, 2025).

Perkembangan awal pendidikan Islam di Indonesia dapat ditelusuri sejak masuknya Islam ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Pada masa tersebut, proses pembelajaran agama masih berlangsung secara sederhana dan informal yang dilakukan di surau, masjid, serta pesantren. Lembaga pesantren kemudian memiliki peran penting dalam mencetak generasi Muslim yang memiliki pemahaman agama yang kuat serta semangat perjuangan yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemunculan lembaga pendidikan Islam tidak terlepas dari dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat Muslim pada saat itu (Naila et al., 2025).

Dari aspek politik, perkembangan lembaga pendidikan Islam di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari situasi kekuasaan pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Sejumlah kerajaan seperti Samudra Pasai, Demak, dan Aceh turut memberi dukungan terhadap tumbuhnya pendidikan Islam, meskipun belum selalu berbentuk sistem pendidikan yang terstruktur secara formal. Hubungan antara ulama dan penguasa pada masa itu cenderung bersifat saling menguntungkan, di mana ulama berperan dalam memberikan legitimasi keagamaan kepada pemerintah, sementara penguasa memberikan dukungan baik secara moral maupun material bagi kegiatan dakwah dan pendidikan. Selain itu, stabilitas politik di beberapa wilayah juga ikut membuka ruang yang lebih luas bagi berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, surau, dan masjid sebagai pusat pembelajaran agama (Novrandianti et al., 2024).

Jaringan perdagangan internasional yang menghubungkan Nusantara dengan dunia

Islam, seperti Timur Tengah dan India, memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan Islam. Melalui interaksi ini tidak hanya terjadi penyebaran ajaran Islam, tetapi juga transfer pengetahuan, tradisi keilmuan, serta metode pembelajaran yang kemudian diadaptasi oleh lembaga pendidikan lokal. Akibatnya, pendidikan Islam di Nusantara berkembang secara dinamis, fleksibel terhadap budaya setempat, dan tetap berakar kuat pada nilai-nilai masyarakat (Sumardi & Harbi, 2025).

Meskipun demikian, kajian mengenai kemunculan dan variasi lembaga pendidikan Islam di Nusantara pada masa pra-kolonial masih perlu dikembangkan lebih lanjut, khususnya dari aspek sosial dan politik yang terintegrasi. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek historis atau kelembagaan secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai dinamika perkembangan pendidikan Islam pada masa tersebut (Girsang et al., 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kemunculan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam di Nusantara pada masa pra-kolonial Belanda serta menganalisis pengaruh faktor sosial dan politik dalam membentuk eksistensi lembaga-lembaga tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berupa studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur dapat ditempuh dengan jalan mengumpulkan referensi yang terdiri beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dikompilasi untuk menarik kesimpulan (Mardalis, 1999). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis isi yang bisa digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan bisa meneliti kembali menurut konteksnya (Krippendoff, 1993). Dalam analisisnya akan dilakukan pemilihan, perbandingan, penggabungan, dan pemilahan sehingga ditemukan yang relevan (Sabarguna, 2005). Pengecekan antar pustaka dan pemerhatian terhadap komentar pembimbing dilakukan guna menjaga kekekalan proses mengevaluasi, mencegah dan menghilangkan informasi yang salah merupakan kesalahan pemahaman manusia yang mungkin timbul karena kurangnya penulis pustaka (Sutanto, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kemunculan Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara pada Masa Pra-Kolonial Belanda

Kemunculan lembaga pendidikan Islam di Nusantara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses Islamisasi yang berlangsung secara bertahap antara abad ke-13 hingga abad ke-16. Proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui interaksi yang panjang antara masyarakat lokal dengan para pedagang, ulama, serta pendatang Muslim dari berbagai wilayah seperti Gujarat, Arab, dan Persia. Pada fase awal, penyebaran Islam bersifat nonformal dan kultural, di mana pendidikan agama disampaikan secara sederhana melalui pengajaran langsung di lingkungan keluarga, masjid, maupun tempat-tempat ibadah kecil lainnya (Husaeni et al., 2026).

Pada tahap awal tersebut, pendidikan Islam belum memiliki sistem kelembagaan yang terstruktur. Proses pembelajaran berlangsung secara individual dan sederhana, umumnya menggunakan metode lisan seperti ceramah, hafalan, serta praktik langsung dalam ibadah. Namun, seiring bertambahnya jumlah penganut Islam dan meningkatnya kebutuhan

masyarakat akan pemahaman agama yang lebih mendalam, mulai berkembang bentuk-bentuk lembaga pendidikan yang lebih terorganisasi dan sistematis (Fakhrurazi & Salamah, 2026). Perkembangan ini semakin dipacu oleh munculnya komunitas-komunitas Muslim di wilayah pesisir yang berfungsi sebagai pusat perdagangan. Komunitas tersebut tidak hanya berperan dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial dan budaya yang mendorong lahirnya kebutuhan akan sistem pendidikan yang lebih terstruktur. Oleh karena itu, kemunculan lembaga pendidikan Islam dapat dipahami sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan religius, sosial, dan kultural masyarakat yang tengah bertransformasi menuju kehidupan yang lebih bercorak Islami (Kamil et al., 2025)

Secara keseluruhan, kemunculan lembaga pendidikan Islam di Nusantara merupakan konsekuensi logis dari proses Islamisasi yang berlangsung secara gradual melalui interaksi sosial-budaya antara masyarakat lokal dan para pendatang Muslim sejak abad ke-13 hingga ke-16. Perkembangan lembaga tersebut kemudian mengarah pada terbentuknya sistem pendidikan yang lebih terstruktur sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan pemahaman agama yang lebih mendalam dalam konteks transformasi sosial menuju kehidupan yang bernuansa Islami.

B. Ragam Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara Masa Pra-Kolonial

Lembaga pendidikan Islam di Nusantara pada masa sebelum kolonial berkembang dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh letak geografis, budaya setempat, serta kondisi sosial masyarakat di tiap wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak memiliki bentuk yang seragam, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan karakter masyarakat di masing-masing daerah (Sumardi & Harbi, 2025).

Pada masa pra-kolonial di Nusantara, terdapat berbagai macam lembaga pendidikan Islam yang berkembang sesuai dengan wilayahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Surau (Minangkabau)

Surau merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berkembang di wilayah Minangkabau. Lembaga ini tidak hanya digunakan sebagai tempat beribadah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan agama dan pembentukan karakter. Di dalam surau, para pemuda dibimbing untuk belajar membaca Al-Qur'an, memahami dasar-dasar ajaran Islam seperti akidah, ibadah, dan akhlak, serta dibiasakan menjalankan nilai-nilai sosial dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, surau memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian religius dan berakhlak bagi generasi muda.

2. Pesantren (Jawa)

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki sistem lebih terstruktur dengan kiai sebagai pemimpin yang memiliki otoritas keilmuan dan spiritual. Di Pulau Jawa, berkembang lembaga pendidikan yang disebut pesantren, yaitu sistem pendidikan Islam yang cukup kompleks. Dalam lembaga ini, kiai berperan sebagai tokoh utama yang memiliki kewenangan dalam bidang keilmuan sekaligus spiritual. Pendidikan di pesantren umumnya menggunakan sistem asrama, sehingga para santri tinggal bersama dalam lingkungan yang teratur dengan kegiatan harian yang mencakup pembelajaran, ibadah, dan pembinaan akhlak. Adapun materi pembelajaran mencakup berbagai ilmu keislaman,

seperti fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf (Susilo & Wulansari, 2020).

3. Dayah (Aceh)

Dayah adalah lembaga pendidikan Islam yang lebih tinggi dan setara dengan pesantren di Jawa. Dayah berperan sebagai tempat pendidikan lanjutan yang mendalami ilmu-ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadis, dan ilmu keislaman lainnya. Selain sebagai tempat belajar, dayah juga berfungsi sebagai pusat kaderisasi ulama, dakwah, dan pembinaan masyarakat.

Di Aceh, lembaga pendidikan Islam dikenal dengan istilah dayah yang memiliki kedudukan setara dengan pesantren di Jawa dan surau di Minangkabau. Dayah memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan budaya masyarakat Aceh sebagai Serambi Mekkah. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar agama, tetapi juga berperan sebagai pusat dakwah, wadah pembinaan, serta sarana penyebaran ajaran Islam di lingkungan sekitarnya. Di dalam dayah, santri merupakan peserta didik yang dibina oleh para pengasuh untuk dipersiapkan menjadi kader ulama dan kader bangsa yang kelak diharapkan menjadi tokoh-tokoh masyarakat (Mildawati & Rama, 2024).

4. Meunasah

Meunasah berasal dari kata madrasah dalam bahasa Arab yang berakar dari kata darasa-yadrusu yang berarti belajar. Sejak awal berdirinya, meunasah telah menjadi pusat penting dalam kehidupan masyarakat Aceh (Zuhri, 2020). Meunasah adalah lembaga pendidikan Islam tingkat dasar yang biasanya ada di setiap gampong (desa). Fungsinya lebih sederhana, yaitu tempat belajar dasar-dasar agama seperti membaca Al-Qur'an, mengenal rukun iman dan rukun Islam, serta menjadi tempat ibadah, musyawarah, dan kegiatan sosial masyarakat. Pesertanya umumnya anak-anak atau masyarakat umum di tingkat awal (Mildawati & Rama, 2024).

5. Langgar

Langgar merupakan tempat ibadah umat Islam berukuran kecil yang dalam konteks Indonesia juga dikenal sebagai mushola, dan telah ada sejak awal penyebaran Islam di Nusantara pada abad ke-13 hingga ke-16. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai tempat salat, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dasar agama dan pusat kegiatan sosial masyarakat yang dibangun secara gotong royong.

Dalam perkembangan pendidikan Islam, langgar berperan sebagai lembaga awal sebelum munculnya pesantren dan madrasah, di mana masyarakat, khususnya anak-anak, belajar membaca Al-Qur'an dan memahami dasar-dasar ajaran Islam di bawah bimbingan guru agama. Seiring waktu, fungsinya lebih terbatas pada kegiatan ibadah dan pembinaan keagamaan sederhana, namun tetap memiliki peran penting dalam kehidupan sosial-keagamaan umat Islam (Hoddin, 2020).

Secara keseluruhan, lembaga pendidikan Islam di Nusantara pada masa pra-kolonial berkembang secara beragam sesuai dengan konteks sosial dan budaya masing-masing wilayah. Meskipun berbeda bentuk dan istilah, seluruh lembaga tersebut memiliki fungsi yang sama dalam membina keilmuan agama, membentuk karakter, serta memperkuat kehidupan keislaman masyarakat.

C. Faktor Sosial yang Melatarbelakangi Lahirnya Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara

1. Kebutuhan masyarakat Muslim terhadap pendidikan agama

Meningkatnya jumlah pemeluk Islam di Nusantara menyebabkan kebutuhan akan pemahaman ajaran Islam yang lebih mendalam dan sistematis semakin besar. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pengetahuan dasar tentang ibadah, tetapi juga pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akidah, syariah, dan akhlak. Kondisi ini mendorong lahirnya lembaga pendidikan Islam sebagai sarana formal maupun non-formal untuk mentransmisikan ilmu agama secara berkelanjutan. Lembaga seperti pesantren dan madrasah kemudian berkembang sebagai pusat pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter dan moral masyarakat Muslim.

2. Interaksi sosial dengan pedagang Muslim

Hubungan antara pedagang Muslim dengan masyarakat lokal di Nusantara tidak hanya terbatas pada kegiatan ekonomi seperti jual beli, tetapi juga berkembang menjadi interaksi sosial dan budaya. Para pedagang Muslim secara tidak langsung memperkenalkan nilai-nilai Islam melalui perilaku sehari-hari, etika perdagangan, serta kebiasaan religius yang mereka praktikkan. Interaksi yang intens ini membuat masyarakat lokal tertarik untuk mempelajari Islam lebih jauh. Dari proses ini, kebutuhan akan tempat belajar dan pembinaan agama semakin meningkat, yang kemudian mendorong lahirnya lembaga pendidikan Islam sebagai wadah penyebaran ilmu dan nilai-nilai Islam secara lebih terstruktur.

3. Perkawinan campuran (asimilasi sosial)

Perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal menjadi salah satu faktor penting dalam proses Islamisasi di Nusantara. Melalui perkawinan ini, terbentuk keluarga baru yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang saling berinteraksi. Anak-anak yang lahir dari keluarga tersebut tumbuh dalam lingkungan yang mulai mengenal nilai-nilai Islam sejak dini. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan pendidikan agama yang lebih terarah agar nilai-nilai Islam dapat diwariskan secara benar kepada generasi berikutnya. Dari lingkungan keluarga inilah kemudian berkembang komunitas Muslim yang lebih mapan dan membutuhkan lembaga pendidikan sebagai sarana pembinaan intelektual dan spiritual.

4. Peran ulama dalam masyarakat

Ulama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim di Nusantara. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengajar agama, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual, penasehat masyarakat, dan tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan sosial. Melalui kegiatan dakwah, pengajian, dan bimbingan keagamaan, ulama menjadi pusat rujukan masyarakat dalam memahami Islam. Besarnya peran dan pengaruh ulama ini mendorong terbentuknya lembaga pendidikan yang lebih terorganisir, seperti pesantren, yang menjadi tempat untuk mendidik generasi muda agar memiliki pemahaman agama yang kuat serta mampu berperan dalam kehidupan sosial.

5. Perkembangan komunitas Muslim

Seiring dengan berkembangnya jumlah pemeluk Islam di berbagai wilayah Nusantara, terbentuklah komunitas-komunitas Muslim yang semakin luas dan beragam. Komunitas ini membutuhkan sarana pendidikan yang mampu menjaga, mengembangkan, dan mewariskan nilai-nilai Islam kepada generasi berikutnya. Lembaga pendidikan Islam muncul sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, tidak hanya sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai pusat pembentukan identitas sosial dan keagamaan masyarakat Muslim. Selain itu, lembaga pendidikan ini juga

berperan dalam memperkuat solidaritas sosial di antara umat Islam serta menjaga keberlanjutan tradisi keilmuan Islam di Nusantara (Ardiwansyah et al., 2023).

Secara keseluruhan, kemunculan lembaga pendidikan Islam di Nusantara dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebutuhan masyarakat, interaksi sosial, perkawinan campuran, peran ulama, dan perkembangan komunitas Muslim. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalam mendorong terbentuknya sistem pendidikan Islam yang lebih terstruktur untuk mendukung proses Islamisasi dan keberlanjutan nilai-nilai keagamaan.

D. Faktor-Faktor Politik Yang Mempengaruhi Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Di Nusantara Masa Pra-Kolonial Belanda

Perkembangan lembaga pendidikan Islam di Nusantara pada masa pra-kolonial tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik yang berkembang pada saat itu. Pendidikan Islam tidak berdiri sebagai institusi yang terpisah dari kekuasaan, tetapi justru tumbuh dalam relasi yang erat dengan struktur kerajaan Islam, jaringan dakwah, serta legitimasi politik yang diberikan oleh penguasa. Faktor-faktor politik ini menjadi determinan penting yang membentuk arah, karakter, dan keberlanjutan pendidikan Islam di berbagai wilayah Nusantara.

1. Peran Kerajaan Islam sebagai Pusat Legitimasi dan Pendidikan

Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, Ternate, dan Gowa-Tallo memainkan peran sentral dalam mengembangkan pendidikan Islam. Kekuasaan politik pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai pengatur pemerintahan, tetapi juga sebagai pelindung dan pendukung aktivitas keagamaan dan pendidikan.

Penguasa kerajaan sering kali berperan sebagai patron pendidikan dengan memberikan dukungan langsung berupa fasilitas, pendanaan, serta pengakuan terhadap ulama. Hal ini menjadikan pendidikan Islam memiliki legitimasi yang kuat karena berada dalam naungan kekuasaan politik formal. Dengan demikian, lembaga seperti halaqah, masjid, dan majelis ilmu berkembang secara stabil karena mendapatkan dukungan dari struktur negara berbasis Islam.

2. Integrasi Kekuasaan Politik dan Otoritas Keagamaan

Pada masa pra-kolonial, tidak terdapat pemisahan yang tegas antara otoritas politik dan keagamaan. Seorang sultan atau raja tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin politik, tetapi juga sering diposisikan sebagai pelindung agama (*ulil amri*) yang bertanggung jawab atas perkembangan Islam. Kondisi ini menciptakan sistem pendidikan yang terintegrasi dengan kekuasaan. Ulama memiliki peran ganda sebagai pendidik sekaligus penasihat politik, sehingga kebijakan kerajaan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Integrasi ini memperkuat posisi pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem sosial-politik yang sah dan diakui masyarakat.

3. Islamisasi sebagai Strategi Politik dan Konsolidasi Kekuasaan

Penyebaran Islam di Nusantara tidak hanya berlangsung secara kultural melalui perdagangan dan dakwah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi politik kerajaan. Banyak penguasa lokal yang memeluk Islam untuk memperkuat legitimasi kekuasaan mereka, terutama dalam konteks hubungan perdagangan internasional dengan dunia Muslim.

Konversi penguasa ke Islam berdampak langsung pada perkembangan pendidikan Islam, karena institusi pendidikan kemudian dijadikan sarana untuk memperkuat ideologi keislaman di masyarakat. Dengan demikian, pendidikan Islam

berfungsi sebagai instrumen islamisasi yang sekaligus memperkuat stabilitas politik kerajaan.

4. Jaringan Ulama dan Diplomasi Intelektual Antarwilayah

Faktor politik lain yang berpengaruh adalah terbentuknya jaringan ulama lintas wilayah yang menghubungkan pusat-pusat Islam di Nusantara dengan Timur Tengah, India, dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Jaringan ini tidak hanya bersifat keilmuan, tetapi juga memiliki dimensi politik dalam bentuk diplomasi dan pertukaran pengaruh.

Ulama sering menjadi mediator antara kerajaan-kerajaan Islam, sekaligus membawa gagasan keagamaan dan sistem pendidikan baru. Mobilitas ulama ini memperkuat penyebaran model pendidikan Islam seperti halaqah, pengajian kitab, dan sistem asrama yang kemudian menjadi cikal bakal pesantren.

5. Stabilitas dan Ekspansi Wilayah Kerajaan Islam

Ekspansi wilayah kerajaan Islam turut berpengaruh terhadap perluasan lembaga pendidikan Islam. Semakin luas wilayah kekuasaan suatu kerajaan, semakin besar pula kebutuhan untuk membangun pusat-pusat pendidikan di daerah baru.

Di wilayah seperti Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi, perluasan pengaruh politik kerajaan Islam dari Jawa dan Sumatera mendorong berdirinya pusat-pusat pendidikan lokal. Pendidikan Islam menjadi bagian dari proses integrasi wilayah ke dalam sistem politik Islam yang lebih luas.

6. Peran Elite Lokal dan Adopsi Islam dalam Struktur Kekuasaan Tradisional

Selain kerajaan besar, elite lokal seperti kepala suku, bangsawan daerah, dan tokoh adat juga berperan dalam mendukung perkembangan pendidikan Islam. Banyak di antara mereka yang mengadopsi Islam sebagai bagian dari strategi adaptasi terhadap perubahan politik regional. Dengan masuknya Islam ke dalam struktur kekuasaan lokal, lembaga pendidikan seperti surau, meunasah, dan langgar mendapatkan ruang untuk berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya dipengaruhi oleh pusat kekuasaan, tetapi juga oleh dinamika politik lokal yang bersifat fleksibel dan adaptif (Romzi et al., 2024).

Secara keseluruhan, perkembangan lembaga pendidikan Islam di Nusantara pada masa pra-kolonial sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melibatkan kerajaan Islam, ulama, serta elite lokal. Relasi antara kekuasaan dan agama tersebut menjadikan pendidikan Islam berkembang sebagai bagian integral dari strategi legitimasi, konsolidasi, dan ekspansi kekuasaan di berbagai wilayah.

E. Hubungan Faktor Sosial dan Politik dalam Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam

Perkembangan lembaga pendidikan Islam di Nusantara tidak dapat dipisahkan antara faktor sosial dan politik karena keduanya saling berhubungan dan saling memengaruhi. Faktor sosial menjadi dasar utama yang mendorong munculnya kebutuhan terhadap pendidikan Islam, sedangkan faktor politik berperan sebagai dukungan struktural yang memungkinkan lembaga-lembaga tersebut berkembang lebih luas, terorganisir, dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, lembaga pendidikan Islam sering kali menjadi ruang pertemuan antara kepentingan sosial dan politik. Di satu sisi, lembaga ini berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama dan pembentukan moral masyarakat. Di sisi lain, lembaga ini juga berperan dalam mencetak individu-individu yang memiliki peran penting dalam struktur

kekuasaan, seperti ulama, penasihat kerajaan, maupun pejabat pemerintahan (Rizqi et al., 2025).

Sinergi antara aspek sosial dan politik tersebut menjadikan lembaga pendidikan Islam tidak sekadar berfungsi sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial-politik yang lebih luas. Lembaga ini berperan dalam menjaga keteraturan sosial, memperkuat identitas keagamaan masyarakat, serta turut menopang legitimasi kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Ardiwansyah et al., 2023).

Dengan demikian, kemunculan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam di Nusantara merupakan hasil dari interaksi kompleks antara dinamika sosial masyarakat dan kepentingan politik penguasa. Hubungan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki peran strategis tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam membentuk struktur sosial dan politik pada masa pra-kolonial.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa kemunculan lembaga pendidikan Islam di Nusantara pada masa pra-kolonial Belanda merupakan bagian integral dari proses Islamisasi yang berlangsung secara bertahap melalui interaksi sosial, budaya, dan ekonomi antara masyarakat lokal dengan para pedagang serta ulama Muslim. Pada awalnya, pendidikan Islam berkembang secara nonformal di masjid, surau, langgar, dan lingkungan komunitas Muslim, kemudian mengalami perkembangan menjadi lembaga yang lebih terstruktur seperti pesantren, dayah, meunasah, serta bentuk-bentuk pendidikan lokal lainnya.

Perkembangan lembaga pendidikan Islam tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik sosial maupun politik. Faktor sosial mencakup interaksi perdagangan, perkawinan, peran ulama, serta terbentuknya komunitas Muslim di berbagai wilayah Nusantara. Sementara itu, faktor politik berupa dukungan kerajaan-kerajaan Islam, hubungan antara kekuasaan dan agama, serta jaringan ulama lintas wilayah turut memperkuat eksistensi dan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan tersebut.

Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam di Nusantara pada masa pra-kolonial tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama, tetapi juga memiliki peran sosial dalam pembentukan karakter masyarakat serta berfungsi sebagai bagian dari sistem legitimasi dan struktur kekuasaan pada masa tersebut.

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas dan memperdalam cakupan yang diteliti, sehingga penelitian selanjutnya bisa melengkapi dari hasil-hasil yang belum ada pada temuan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiwansyah, B., Islam, U., Raden, N., Palembang, F., Metro, U. M., & Metro, U. M. (2023). *POTRET GERAKAN INTELEKTUAL DAN INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA BESERTA FAKTOR-*. 07, 158–178.
- Asiyah, S. (2019). *PERAN PENDIDIKAN DALAM MEWARISKAN NILAI – NILAI BUDAYA BANGSA Oleh : Siti Asiyah*. XVII, 155–163.
- Fakhrurazi, F., & Salamah, S. (2026). Dinamika Historis Pendidikan Agama Islam di Tanah Banjar: Dari Dakwah Tradisional ke Sistem Pendidikan Formal. *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 44–57.

- Girsang, E. P. B., Sinambela, A., Harefa, F. M. S., Tarigan, J. A. G., & Lukitoyo, P. S. (2026). PERAN STRATEGIS KESULTANAN PERLAK DALAM PROSES ISLAMISASI AWAL DI NUSANTARA. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(01), 124–136.
- Hodddin, M. S. (2020). Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14(1), 15–30.
- Husaeni, B., Komarudin, A. K., Wahyudin, A., Primagraha, U., Nida, I., Adabi, E., & Bogor, S. A. (2026). *Perkembangan Islam di Banten : Sebuah Analisis Historis*. 5(1), 316–324.
- Mildawati, T., & Rama, B. (2024). *Vifada Journal of Education ISSN : 3021-713X Sejarah Perkembangan Islam Pada Masa Awal Hingga Munculnya Kerajaan Islam di Aceh (Lembaga Pendidikan Islam Dan Tokohnya)*. 2(1), 1–27.
- N, M. K. J., Mokodongan, F., & Kasim, R. (2025). MENJADI MUSLIM DI MINAHASA UTARA : DINAMIKA KEHIDUPAN KOMUNITAS ISLAM. 10(02), 142–164.
- Naila, S., Asiah, S., & Ifendi, M. (2025). *Dinamika Pendidikan Islam di Era Reformasi : Dari Tradisional ke Modern*. 03, 29–38.
- Novrandianti, N., Firdaus, E., & Anwar, S. (2024). Pendidikan Islam Di Indonesia: Dari Awal Penyebaran Islam Hingga Era Reformasi Pendidikan. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(2), 279–294.
- Rizqi, R. M., Maulana, A. R., Pratama, A., & Yudra, M. D. (2025). KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DAN KEBUTUHAN SOSIAL. 3, 263–274. <https://doi.org/10.58540/pijar.v3i3.956>
- Rohani, R., Ernita, M., & Salmiah, S. (2022). Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda (Kasus Muhammadiyah Dan NU). *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 18(2), 103–117.
- Romzi, M., Noviyanti, S. F., & Wahananto, J. (2024). TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA : TINJAUAN HISTORIS DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN Islam di Indonesia dari masa awal Islamisasi hingga periode modern , sekaligus pendidikan Islam di kawasan lain . perspektif komparatif dan historis yang lebih luas menjadi kesenjangan dari beberapa. 1(2).
- Setyawan, H. A. (2025). Membangun Peradaban: Dinamika Kelembagaan Pendidikan Islam melalui Surau, Masjid, dan Pesantren di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 289–315.
- Sumardi, E., & Harbi, H. A. (2025). Islamisasi Di Nusantara: Jalur Perdagangan Sebagai Sarana Penyebaran Islam Abad Ke-13–16. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 16(2), 91–100.
- Susilo, A., & Wulansari, R. (2020). *Sejarah Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. 20(2), 83–96.
- Syafei, I. (2025). *Sejarah Pendidikan Islam*. Penerbit Widina.
- Zuhri. (n.d.). BENTUK-BENTUK KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. 24–44.